

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan

Khairiyah Amalia¹, Zikri Alhadi²

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : khairiyahamaliaa@gmail.com, zikri.ianunp@gmail.com

Abstrak

Riset ini bermaksud mengenali serta menganalisa aspek pendorong serta aspek penghalang dalam penyelesaian musibah tanah gugur di Kabupaten Pantai Selatan. Metode pengumpulan informasi yang dipakai ialah dengan pemantauan, tanya jawab serta riset pemilihan serta buat mencoba keabsahan informasi dipakai metode triangulasi pangkal dimana metode triangulasi pangkal berarti menyamakan serta mengecek balik keyakinan sesuatu data yang didapat lewat durasi serta perlengkapan yang berlainan dari riset kualitatif. Sebaliknya, metode analisa informasi yang dipakai ialah lewat pengurangan informasi, penyajian informasi, kesimpulan konfirmasi. Hasil penelitian ini adalah BPBD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan pihak-pihak nagari terkait agar memberi himbauan kepada masyarakat yang membangun perumahan dibukit atau daerah yang rawan terjadinya longsor dan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Mendirikan posko bencana didaerah yang rawan terjadi longsor apalagi disaat cuaca memasuki musim hujan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penanggulangan, Bencana, Tanah Longsor*

Abstract

This study aims to identify and analyze the driving factors and inhibiting factors in landslide disaster management in Pesisir Selatan Regency. The data collection technique used is by observation, interview and documentation study and to test the validity of the data used the source triangulation technique where the source triangulation technique means comparing and re-examining the trustworthiness of an information obtained through time and different tools from qualitative research. Meanwhile, the data analysis technique used is through data reduction, data presentation, and verification conclusions. The results of this study are that the BPBD of Pesisir Selatan Regency conducts outreach to people who live in landslide-prone areas, BPBD of Pesisir Selatan Regency coordinates with the related nagari parties to give an appeal to people who build housing in hills or areas prone to landslides and BPBD of Pesisir Selatan Regency Establishing disaster posts in areas prone to landslides, especially when the weather enters the rainy season.

Keywords: *Effectiveness, Management, Disaster, Landslide*

PENDAHULUAN

Selain menjadi Negara yang memiliki banyak potensi alam yang sangat indah, Indonesia juga berpotensi mengalami ancaman bencana alam. Bencana alam yang

terjadipun seolah sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat sendiri karena seringnya terjadi berbagai jenis bencana alam diberbagai wilayah di Indonesia.

Dalam undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia di saat intensitas hujan tinggi hampir di setiap wilayah di Indonesia adalah bencana tanah longsor. Hal ini disebabkan karena 45% luas lahan di Indonesia merupakan lahan pengunungan berlereng yang peka terhadap longsor dan erosi.

Bencana longsor merupakan suatu peristiwa keseimbangan tanah yang mengalami gangguan sehingga mengakibatkan terjadinya pergerakan dari massa tanah karena factor gaya yang terletak pada bidang tanah yang tidak rata (lereng) dan batuan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah.

Untuk itu, tentu diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana yang sedemikian rupa terjadi ini dari berbagai pihak, baik itu pemerintah yang memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam upaya penanggulangan terhadap bencana yang terjadi maupun masyarakat secara bersama yang harus memiliki kesadaran akan penyebab bencana tersebut terjadi.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang rawan terjadi bencana, seperti misalnya bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir adalah kawasan dengan sebagian perbukitan dan dataran dengan kemiringan yang tidak stabil. Adapun salah satu daerah yang rawan terjadi peristiwa tanah longsor di daerah tersebut adalah Kecamatan Batang Kapas. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2021 yang mana longsor tersebut terjadi di kawasan Bukit Pulai, Nagari IV Koto Hilie hingga menutupi sebagian badan jalan lintas Painan-Batang Kapas akibat dari tumpukan material longsor yang berjatuh menimpa badan jalan. Bencana tanah longsor ini terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi saat itu. Selain menimbun badan jalan sehingga menghambat akses jalan pengendara yang melewati jalan tersebut namun juga menghambat akses jalan masyarakat setempat dalam beraktivitas seperti bekerja dan membeli bahan pokok, dan bencana tanah longsor tersebut juga menimpa salah satu rumah milik warga setempat dan satu unit mobil yang pada saat itu melewati kawasan titik longsor tersebut.

Kemudian peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai Bapak Zulman, salah satu warga Bukit Pulai Nagari IV Koto Hilie yang tinggal di titik kawasan rawan bencana tanah longsor di Batang Kapas, beliau mengatakan bahwa:

“...disini memang sangat rawan sekali terjadi bencana tanah longsor apalagi disaat sedang dilanda musim hujan. Kami juga ikut serta membantu pemerintah dalam menangani bencana tanah longsor ini bila terjadi. Kami langsung terjun ke lapangan yaitu titik tempat bencana longsor terjadi saat itu juga sebagai penanganan darurat pertama, sembari menunggu pihak dari Kabupaten datang. Kami membantu membersihkan material-material longsor hingga membantu mengatur lalu lintas.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Zulman diatas dijelaskan bahwa bencana tanah longsor memang rawan sekali terjadi, apalagi saat musim hujan melanda. Masyarakat setempat ikut serta membantu dalam menangani bencana tanah longsor yang terjadi. Penanganan yang sangat cepat harus dilakukan

agar tidak terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Doni Boy, SKM,MM selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, beliau mengatakan bahwa:

“...daerah kita ini Kabupaten Pesisir Selatan memang rawan terjadi longsor, ada beberapa kecamatan yang memang menjadi titik rawan terjadi bencana tanah longsor ini diantaranya Kecamatan Koto IX Tarusan, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan dan Kecamatan Lengayang. Hal ini dikarenakan topografi daerahnya yang perbukitan serta curah hujan yang tidak menentu. Namun selain itu aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur dan pengrusakan hutan juga menjadi penyebabnya. Dan tentunya banyak dampak yang ditimbulkan misalnya terganggunya aktivitas, hancurnya bangunan, kegagalan panen, kerusakan prasarana fisik hingga korban jiwa.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Doni Boy, SKM.,MM selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan diatas dapat diketahui bahwa bencana tanah longsor yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kondisi alam saja akan tetapi juga disebabkan karena ulah tangan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Terdapat banyak berbagai dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor ini seperti terganggunya aktivitas masyarakat setempat, hancurnya bangunan, kegagalan panen, kerusakan prasarana fisik hingga korban jiwa.

Terkait hal tersebut tentunya peran maksimal dari pemerintah daerah sendiri dalam penanggulangan bencana tanah longsor ini sangatlah diperlukan. Namun tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga keterlibatan semua pihak yang terkait. Mereka harus ikut berperan aktif termasuk juga masyarakat yang turut serta ikut aktif dalam melakukan penanganan bencana tanah longsor yang terjadi. Penanggulangan bencana tanah longsor dilakukan sebagai suatu usaha guna mencegah, menyiagakan serta melakukan penanganan yang diakibatkan oleh bencana tersebut dengan melakukan persiapan sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi. Dengan adanya upaya penanggulangan bencana ini yang dilakukan diharapkan akan dapat mencegah sertamengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor yang terjadi. Terkait hal tersebut Bapak Doni Boy, SKM.,MM selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, beliau mengatakan bahwa:

“...dalam penanggulangan bencana tanah longsor ini, kami bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintah Nagari hingga masyarakat yang terkena bencana tanah longsor. Selain itu kami juga ada Tim Reaksi Cepat yang mengkaji awal secara cepat bencan dan dampak bencana dan juga kami telah membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tiap nagari dan membuat peta potensi kerawanan bencana berbasis kecamatan.”

Berdasarkan lanjutan wawancara peneliti dengan Bapak Doni Boy, SKM,MM selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan diatas dijelaskan bahwa dalam melakukan penanggulangan bencana

tanah longsor, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan *leading sector* dalam penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang bekerja sama dengan berbagai OPD terkait misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyediaan alat berat, Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas, Dinas Perkimtan dalam perbaikan rumah yang rusak akibat tanah longsor, Dinas sosial dalam memberikan bantuan logistik seperti bahan makanan, Dinas Kesehatan dalam pertolongan pertama dan penyediaan obat-obatan terhadap korban yang terkena bencana tanah longsor maupun pemerintah nagari terkait yang merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di nagari. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mempunyai tugas untuk mengkaji awal dengan cepat bencana dan dampak bencana dan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan juga telah membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) pada tiap nagari dan membuat peta potensi kerawanan bencana berbasis kecamatan. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain memberikan penguatan kepada seluruh unsur di nagari serta masyarakat, melaksanakan pelatihan mitigasi serta penanganan kebencanaan terhadap tim yang dibentuk.

Selanjutnya bapak Doni Boy, SKM,MM selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan juga menambahkan lagi bahwa :

“...dalam penanggulangan bencana tanah longsor ini kami mengalami beberapa kendala seperti: terkait terbatasnya sumber daya manusia yang ada dan terbatasnya jumlah alat berat yang tersedia. Dimana apabila bencana tanah longsor terjadi diberbagai titik dalam satu waktu yang sama tentunya memerlukan sumber daya manusia yang banyak serta alat berat yang mencukupi. Sementara untuk alat berat sendiri kami hanya memiliki 1 unit ekskavator. Selain itu, jauhnya titik kawasan terjadinya longsor dan akses jalan yang sulit untuk ditempuh sehingga memerlukan waktu yang lama untuk bisa sampai TKP juga menjadi kendala dalam penanggulangan bencana tanah longsor ini.”

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor yang dilakukan. Ada beberapa kendala atau permasalahan yang ditemui, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia yang ada, terbatasnya jumlah alat berat ekskavator yang dimiliki serta jauhnya daerah terjadinya longsor sehingga memerlukan waktu yang lama untuk bisa sampai ke titik kawasan terjadinya longsor. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan”

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yang mana peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan yang dikembangkan dengan data yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan verifikasi. Kemudian teknik pengumpulan informan yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain, sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong

Adapun yang menjadi faktor pendorong dari efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1) Aparatur dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Doni Boy, SKM., MM. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan. Beliau mengungkapkan :

“...alhamdulillah, kita di BPBD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki personil sebanyak 53 orang. Saat terjadi bencana tanah longsor kita berkoordinasi dengan TNI dari Dandim Painan, Basarnas Pesisir Selatan, Anggota Polri dari Polres Painan, Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menangani bencana tanah longsor ini”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Asben, salah satu warga Bukit Pulai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas. Beliau menjelaskan :

“...di Bukit Pulai ini memang sangat rawan terjadi longsor, dan disaat terjadi longsor, kami melakukan penanganan darurat terlebih dahulu dengan membantu membersihkan material longsor yang bisa kami atasi, sembari pihak kabupaten sampai agar evakuasi lebih cepat terselesaikan, dan Alhamdulillah juga kami melihat pemerintah dan semua OPD terkait juga cepat tanggap dalam menangani longsor ini, mereka datang membersihkan material longsor yang menimbun jalan, mengatur lalu lintas yang macet diakibatkan oleh jalan yang terhambat dan mereka juga membawa logistik bantuan makanan dan alat berat juga untuk memudahkannya dalam bekerja”. (Wawancara 08 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan Bapak Irsat selaku Perangkat Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas. Beliau menjabarkan :

“...ya, benar di Kecamatan Batang Kapas juga dilakukan upaya mitigasi bencana tanah longsor dan kami disini juga melibatkan masyarakat. Alhamdulillah sekali, masyarakat banyak yang mau ikut berpartisipasi karena ini adalah penting untuk kita semua, dan saya senang pemerintah juga peduli dan memperhatikan kami di daerah yang rawan longsor ini”. (Wawancara 12 September 2022)

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dari efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu aparatur dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dimana BPBD memiliki personil yang cukup serta dengan sigap berkoordinasi dengan TNI dari Dandim Painan, Basarnas Pesisir Selatan, Anggota Polri dari Polres Painan, Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat nagari maupun masyarakat setempat.

2) Anggaran dari pemerintah yang cukup

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan Bapak Doni Boy. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan. Beliau menjelaskan :

“...ya, kalau dari segi anggaran yang kita pantau yah dalam kategori cukup lah yah dan Alhamdulillah kami tidak terkendala akan hal ini, karena memang daerah kita ini adalah daerah perbukitan yang tentu sangat rawan akan terjadi longsor”.

Senada dengan Ibuk Refalinda Asyuni A.Mk Selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau menerangkan :

“...kalau kita berbicara segi anggaran, dari Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita di Kabupaten Pesisir Selatan diberikan anggaran yang cukup dan dikhusus kan karena ini semua berdasarkan kebutuhan kita di Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat rawan terhadap potensi bencana karena daerah pesisir yah termasuk bencana tanah longsor juga”.

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dari efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, kedua yaitu anggaran dari pemerintah yang cukup dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan perlu diberikan perhatian khusus tentu hal ini disebabkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan yang rawan dan sering menjadi langganan bencana termasuk salah satunya bencana tanah longsor.

b. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1) Pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Doni Boy, SKM., MM. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan. Beliau menjelaskan :

“...kondisi alat dari BPBD dalam menangani bencana tanah longsor yang tersedia kurang lengkap, selain itu banyak alat untuk mitigasi bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah dimakan umur. jadi, ini perlu pembaharuan dan penambahan”.

Lebih jauh, Bapak Doni Boy, SKM., MM. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan. Beliau menjelaskan :

“...terkadang jika bencana tanah longsor yang terjadi dibanyak titik dengan material longsor berupa batu-batu yang besar-besar tentunya membutuhkan alat yang cukup, sementara alat yang tersedia di kita hanya terbatas”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Herry Susilo, ST. Selaku Kepala Seksi Rutin Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau menjelaskan :

“...kalau bencananya adalah bencana tanah longsor ya jelas dan pasti BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan kita di PUTR, karna kita PUTR memiliki alat berat yang tentunya dapat membantu membersihkan material tanah longsor ini dengan cepat, akan tetapi alat berat seperti ekskavator, namun yang menjadi kendalanya apabila bencana longsor ini terjadi pada waktu yang sama dibanyak titik tentu akan memerlukan waktu yang lama untuk kita membersihkannya, karena

alat yang kami milikipun juga terbatas”.

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, yang pertama yaitu pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengatasi ini, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan Dinas PUTR untuk membantu membersihkan daerah yang tertimbun longsor dengan menggunakan alat berat yang dimiliki oleh Dinas PUTR.

2) Sumber Daya Manusia yang terbatas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan Bapak Bapak Doni Boy, SKM., MM. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan. Beliau menjelaskan :

“...yang mana diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki cakupan wilayah yang Panjang dengan 15 Kecamatan dan 82 Nagari, dan jika bencana longsor terjadi di waktu yang sama dibanyak titik tentu akan memerlukan personil yang banyak untuk dikerahkan. Sementara untuk jumlah personil kami sendiri terbatas”.

Lebih lanjut, Bapak Bapak Doni Boy, SKM., MM. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan. Beliau menjelaskan :

“...dan terbatasnya jumlah personil yang kami perlukan pada saat penanggulangan bencana inilah yang memperlambat penanganan bencana tanah longsor”.

Dari uraian wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, yang kedua yaitu personil atau sumber daya manusia yang tersedia terbatas. Keterbatasan jumlah personil dalam penanggulangan bencana tanah longsor ini tentu menjadi penghalang atau penghambat dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor.

3) Kesadaran masyarakat yang masih kurang

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Doni Boy SKM MM Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau mengungkapkan :

“...tanah longsor sangat sering terjadi yah, kita selalu ingatkan masyarakat jangan ada lagi yang menebang pohon secara berlebihan, tidak itu saja kita juga beri himbauan untuk tidak membangun rumah didekat perbukitan karna sangat berpotensi terdampak bencana tanah longsor”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Herizal Selaku masyarakat yang tinggal di Bukit Pulai Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batangkapas. Beliau mengungkapkan :

“...kalau sudah hujan apalagi berhari-hari tentu kami disini siaga bahkan tidak tidur yah karna suatu waktu longsor bisa terjadi apalagi rumah kami tepat dibawah Bukit Pulai ini didirikan, ya gimana lagi kami gak punya tanah untuk bangun rumah didaerah yang aman”

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, yang kedua yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang karena menganggap bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlalu sering dan dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Selain

itu, teguran dan himbauan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan agar tidak terlalu banyak melakukan penebangan pohon serta untuk menghindari membangun rumah dan bermukim didaerah perbukitan yang rawan longsor dan ini tidak didengarkan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : a. Faktor Pendorong 1) Aparatur dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana, Keterlibatan OPD terkait merupakan salah satu upaya untuk dapat cepat menanggulangi bencana tanah longsor ini. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Sosial, Perkimtan, Polres Painan, TNI, Perangkat Nagari dan Masyarakat; 2) Anggaran pemerintah yang cukup, Anggaran yang mencukupi sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah daerah setempat dalam upaya penanggulangan bencana ini, baik untuk perlengkapan alat yang dibutuhkan maupun memenuhi bantuan yang dibutuhkan oleh korban yang terkena dampak longsor; b. Faktor penghambat: 1) Pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim, Dalam penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan ini alat perlengkapan seperti alat berat yang tersedia sangatlah terbatas. Sedangkan dalam menangani bencana tanah longsor ini tentu memerlukan alat yang cukup; 2) Sumber daya manusia yang terbatas, Keterbatasan jumlah personil atau anggota yang dimiliki dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor tentunya menjadi kendala, apabila jika longsor yang terjadi diwaktu yang sama dengan beberapa titik dan lokasi yang berjauhan; 3) Kesadaran masyarakat yang kurang, Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor dalam mematahi teguran dan himbauan yang telah diberikan. Misalnya dalam kegiatan penebangan pohon sembarangan dan membangun rumah di kawasan yang memang rawan terjadi longsor.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa J, dkk. 2015. Analisis Daerah Rawan Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Lima Puluh Kota; Sumatera Barat). *Jurnal JOM FTEKNIK*. Vol. 2, No. 2.
- Heriyati, Sri. 2020. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol. 2, No. 2.
- Kurniawan Y, dkk. 2018. Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Geografi*, Vol. 6, No. 3.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : alfabet.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2007